

---

## BUDAYA PATRIARKI DAN KESETARAAN GENDER

Luthfia Rahma Halizah<sup>1</sup>, Ergina Faralita<sup>2</sup>

[luthfialrh29@gmail.com](mailto:luthfialrh29@gmail.com), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin<sup>1</sup>

[ergienafaralita@gmail.com](mailto:ergienafaralita@gmail.com), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin<sup>2</sup>

---

### *Abstract*

*In the social system that applies in society, we often encounter gaps between men and women. This gap not only occurs within the family or household but also becomes a culture in society and even a culture in the life of the nation and state. For this reason, this article will discuss patriarchal culture and gender equality between men and women. The method used in writing this article is library research.*

*Until now, patriarchal culture is still very influential in people's lives in rural and urban areas. Men are still dominant in controlling the social system of society in various fields of life, both in the economic, political, religious, and socio-cultural fields. As a result, women are a marginalized group. Gender differences between men and women often lead to gender discrimination and injustice, and the victims are primarily women. To prevent the occurrence of gender inequality, efforts are made through empowerment programs for women.*

**Keyword:** Patriarchal culture, Gender equality

### *Abstrak*

*Dalam sistem sosial yang berlaku di masyarakat, kita sering menjumpai kesenjangan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kesenjangan itu tidak hanya terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga, tetapi juga menjadi budaya dalam masyarakat, bahkan menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah dalam artikel ini akan dibahas tentang budaya patriarki dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan.*

*Budaya patriarki sampai sekarang ini masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kaum laki-laki masih dominan menguasai system sosial masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya. Akibatnya kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan. Perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan seringkali menimbulkan diskriminasi*

*dan ketidakadilan gender, dan yang menjadi korban paling banyak adalah kaum perempuan. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan gender tersebut, maka dilakukan usaha melalui program pemberdayaan terhadap kaum perempuan.*

**Kata kunci:** Budaya patriarki, Kesetaraan gender

## **Pendahuluan**

Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; istri; bini.<sup>1</sup> Bahasa sederhana yang sering kita gunakan, perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki. Dalam Bahasa Sanskerta kata perempuan diambil dari kata per + empu + an. *Per*, memiliki arti makhluk, *empu* yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan.

Perempuan yang tinggal di pedesaan pada umumnya bekerja dalam bidang pertanian, selain sebagai ibu rumah tangga. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>2</sup> Di Indonesia secara umum, istilah desa ditunjukan sebagai pembagian wilayah administratif. di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut RW atau rukun warga, dan RT atau rukun tetangga.

Selama ini masih banyak orang yang salah dalam memahami kedudukan kaum perempuan. Mereka beranggapan bahwa tugas perempuan hanyalah tugas reproduktif (melahirkan) dan yang berhubungan dengan urusan domestik (kerumahtanggaan). Karena hanya memiliki fungsi reproduktif, maka tugas perempuan hanyalah di rumah untuk melanjutkan keturunan, yaitu melahirkan anak dan mengurus anak yang dilahirkannya.

Perempuan juga dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah, penuh keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak logis, sehingga tidak layak untuk bekerja di sektor publik. Kalaupun ada perempuan yang bekerja di sektor

---

<sup>1</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.856.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.256.

publik, membangun karir dan berkompotensi dengan kaum laki-laki maka dianggap sudah menyalahi kondratnya sebagai kaum perempuan.

Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai penguasa dan kaum perempuan adalah manusia kelas dua yang harus tunduk kepada laki-laki. Diskriminasi berbasis gender ini sering menyebabkan kaum perempuan mengalami berbagai perlakuan yang bersifat eksploitasi sehingga menghambat kaum perempuan berperan di ranah publik. Budaya patriarki ini tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga atau keluarga, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini budaya patriarki masih tetap berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya ini bisa dijumpai dalam beragam aspek dan ruang lingkup, seperti ekonomi, pendidikan, politik, sampai hukum sekalipun.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dipercaya bisa mengakhiri kemiskinan kaum perempuan. Salah satu penyebab lahirnya kemiskinan perempuan adalah karena adanya budaya patriarki yang membatasi akses partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Akibatnya kaum perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Padahal tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk menjadi kepala keluarga.

### **Metode Penelitian**

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Maksudnya melakukan telaahan atas buku-buku kepustakaan yang ada untuk dibuat dalam bentuk artikel ilmiah. Isinya berupa ulasan atau uraian yang memberikan jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang sedang diteliti atau ditulis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Budaya Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak.<sup>3</sup> Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan.<sup>4</sup> Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.<sup>5</sup>

Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, kaum intelektual, dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk menjadi sebuah budaya. Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama, dan instrumen-instrumen pendidikan sejak dari pendidikan keluarga sampai pada pendidikan formal. Sebagai contoh terutama pada masyarakat Hulu Sungai di pedesaan, bagaimana mungkin perempuan ingin maju kalau ia diminta oleh orang tuanya agar berhenti sekolah karena harus menjaga (Bahasa Banjar:

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 837.

<sup>4</sup> Lusiana Palulungan, dkk., *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hlm. 53.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 39.

“maingu”) beberapa orang adik-adiknya yang masih kecil. Karena orang tuanya harus pergi ke ladang untuk bertani atau berkebun.

Selama ini sistem sosial yang berlaku di Indonesia secara umum sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur patriarki. Hal inilah yang mempengaruhi berbagai sistem yang ada termasuk di wilayah Kalimantan Selatan, baik sistem politik, ekonomi, sosial budaya maupun agama. Budaya patriarki menekankan pada superioritas kaum laki-laki dan perempuan hanya di tempatkan dalam wilayah domestik. Dalam “Bahasa Banjar” tugas perempuan diidentikkan dengan istilah dapur (memasak), sumur (mencuci), dan kasur (berkembang biak/melahirkan).

## **2. Kesetaraan Gender**

Gender berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*genus*”, yang berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Karena dibentuk oleh lingkungan sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung pada waktu atau tren dan tempat atau wilayahnya.

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hellen, ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley, bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi.<sup>6</sup> Selama ini kita sering keliru dalam memahami gender dan masalah perempuan. Ketika kita membicarakan gender seakan-akan dianggap sebagai masalah perempuan saja, sehingga harus diurus dan diselesaikan sendiri oleh perempuan.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan gender. Akan tetapi dalam banyak kasus, adanya perbedaan gender telah menimbulkan ketidakadilan gender, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korbannya. Di samping itu, banyak kaum laki-laki yang mengambil keuntungan dari kehidupan yang tidak adil tersebut. Sebagian

---

<sup>6</sup> Rasyidin, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik* (Banda Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 16-17.

malah ada yang berusaha untuk mempertahankan situasi ketidakadilan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan hukum formal dan penafsiran terhadap dalil-dalil agama.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu (perempuan) secara berlebihan.<sup>7</sup> Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi kita sering menyaksikan, perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi kaum perempuan yang bekerja di luar rumah seperti menjadi buruh tani bagi yang tinggal di pedesaan atau menjadi buruh/karyawan perusahaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika pulang ke rumah.

Untuk memaksimalkan perbaikan peran kaum perempuan ke depan, maka pemahaman masalah kesetaraan gender mutlak diperlukan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu tidak benar jika ada orang yang beranggapan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah ada. Sesungguhnya kesetaraan dan keadilan gender adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Karena itu laki-laki dan perempuan harus berupaya untuk melawan sistem yang tidak adil.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah melakukan pemberdayaan perempuan. Secara harfiah, kata pemberdayaan merupakan penerjemahan dari kata “empowerment”, dari kata dasar power atau kekuasaan. Karena itu ide utama pemberdayaan perempuan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Maksudnya pola pendekatan yang memposisikan perempuan sebagai subyek dalam pembangunan, bukan lagi obyek pembangunan.

---

<sup>7</sup> Lusya Palulungan, dkk., *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hlm. 3.

Menurut Saidah Sakwan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia memerlukan pendekatan yang integral. Strategi pemberdayaan perempuan di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga tahap, yaitu:<sup>8</sup>

1) Rekonstruksi paradigma

Pradigma adalah pola atau cara pandang terhadap suatu obyek yang diterima secara luas, sehingga menjadi fondasi bagi eksplorasi obyek tersebut lebih jauh. Pradigma menjadi landasan berpikir bagi manusia dalam memandang, menganalisa dan bahkan menjustifikasi sesuatu yang pada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan tindakan.

Pada konteks perempuan dan relasi kekuasaan, paradigma yang berkembang di masyarakat masih dipengaruhi oleh sistem patriarki harus dirubah dengan cara membangun paradigam baru yang lebih sensitif gender. Misalnya melihat kaitan antara perempuan dan agama secara lebih positif, paling tidak dari kandungan keprihatinan atas kekerasan terhadap perempuan, dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat perempuan.

2) Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan Gender adalah salah satu kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah untuk mempersempit atau meniadakan kesenjangan gender. Contohnya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan ditandai dengan masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan dalam bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, serta pengakuan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan. Maka perencanaan yang responsif gender

---

<sup>8</sup> Saidah Sakwan, dkk., *Politik Perempuan dalam Ormas Keagamaan* (Jakarta: IRCOS, 2007), hlm. 44-52.

harus dilakukan di seluruh lingkup pemerintahan, dari tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.

### 3) Penguatan Kapasitas Perempuan

Penguatan kapasitas perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan, dalam perspektif pluralis perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai lemahnya kapasitas kaum perempuan. Maksudnya adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bisa bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerja sistem (aturan main). Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kepada individu atau kelompok, bagaimana bersaing di dalam peraturan.

### 3. Pilihan Dilematis Kaum Perempuan

Sebagaimana sudah dikemukakan, perempuan termarginalkan hampir terjadi di semua bidang kehidupan, baik sektor politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Jam kerja yang cukup panjang baik di sektor swasta maupun di instansi pemerintahan, kesulitan adanya sarana penitipan anak dan menyusui anak di tempat kerja, merupakan contoh nyata cerminan akan terjadinya marginalisasi.

Media massa sekarang ini memiliki peran yang cukup besar, posisi perempuan sering digambarkan tidak menggembirakan, cenderung tidak terwakili dengan layak.<sup>9</sup> Dalam ranah hiburan, produk iklan, bahkan dalam program berita, baik media cetak maupun media televisi, netralitas dan obyektivitas potret perempuan selalu berada dalam posisi terdiskriminasi. Perempuan digambarkan sebagai orang yang pasif dan sangat tergantung dengan laki-laki. Selalu menerima keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki, dan yang lebih parah perempuan hanya dijadikan sebagai simbol seks.

---

<sup>9</sup> Ditha Prasanti, "Tubuh Perempuan Tambang Emas Bagi Media Massa," *Journal Citra Perempuan Dalam Media*, vol. 10, no.1, (2012): hlm. 72.

Di sektor swasta juga terjadi ketidakadilan, mulai dari perbedaan upah yang diterima dalam jumlah jam kerja yang sama penghasilan perempuan lebih kecil dari pada yang diterima kaum laki-laki. Diskriminasi ini terjadi pada perempuan baik secara implisit maupun eksplisit, karena dianggap tugas utama perempuan adalah di sektor domestik atau urusan kerumahtanggaan, sehingga pekerjaan mencari uang hanyalah sebagai pekerjaan “*sampingan*” untuk membantu suami.

Meskipun cuti melahirkan diberikan dan telah berlaku secara luas, tetapi masih ada yang merasa rugi memberi cuti melahirkan kepada karyawan perempuan karena dianggap pemborosan dan tidak efisien. Diskriminasi ini dilakukan secara terselubung dengan cara mengutamakan rekrutmen karyawan laki-laki, atau kalau terpaksa maka dengan persyaratan perempuan yang masih lajang.

Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Konsep gender dimaknai suatu sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat secara kultural maupun sistemik. Seperti perempuan secara kultural dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional, jantan dan perkasa.

Ketika ada perempuan yang bekerja pada bidang-bidang tertentu yang dianggap “keras” atau banyak berhubungan dengan dunia laki-laki, maka pekerjaan itu dianggap bukan pekerjaan perempuan. Padahal dimasa sekarang ini, pekerjaan bisa dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu, dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hal itu tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja, bahkan dalam lingkup pemerintahan.

Di sektor lembaga formal, meskipun persentase penduduk Indonesia lebih kurang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki 136.660.000 orang atau 50,58%, perempuan 133.540.000 orang atau 49,42% (sensus penduduk 2020), namun perempuan yang menjadi anggota parlemen hanya 123 orang atau 21%

dari total anggota parlemen.<sup>10</sup> Hal yang sama terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari total 30 orang anggota DPRD hanya 6 orang perempuan (20%). Demikian pula dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural seperti jabatan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota masih sangat sedikit (Bahasa Banjar: *bisa dihitung dengan jari*).

Contoh kasus dalam bidang politik, banyak partai politik yang terlihat enggan memenuhi kouta keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.<sup>11</sup> Keengganan ini ditampakkan melalui proses penyusunan daftar bakal calon anggota legislatif yang menempatkan caleg perempuan pada nomor urut bawah. Selain itu juga terlihat ketika partai politik secara samar menyampaikan pertimbangan yang terlihat arif bahwa kaum perempuan diminta tidak memaksakan agar kouta 30% harus dipenuhi. Semua ini menunjukkan adanya keterpaksaan, hanya karena harus memenuhi tuntutan Undang-Undang.

Dari kasus tersebut kita berharap ke depan, tuntutan kouta 30% tidak sekedar didasari keterpaksaan, tetapi atas dasar konsekuensi logis dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang partisipatoris. Hampir 50% penduduk Indonesia adalah adalah wanita, sehingga sangatlah wajar mereka diberi peran yang setara dengan kaum laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukankah, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 27, bahwa “kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan”.

Semoga dimasa yang akan datang banyak kaum perempuan yang tertarik dengan masalah kesetaraan gender dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri. Saat ini hanya sedikit kaum laki-laki yang mau terlibat dalam isu-isu gender dan masalah-masalah perempuan. Kalau tidak perempuan sendiri yang mencoba bangkit dan menyuarakan hak-hak kaum

---

<sup>10</sup> DPR RI, *Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan dalam Politik* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), h. 1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33754/t/Tiga+Politisi+Wanita+Bicara+Peran+Perempuan+dalam+Politik> (10 Januari 2023).

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245.

perempuan, siapa lagi. Kendala yang dihadapi, akan selalu ada anggota masyarakat yang mencemooh kita sebagai orang yang kurang kerjaan dan mengurus pribadi orang lain.

Pilihan bagi kaum perempuan sudah ada di depan mata, apakah ingin menjadi ibu rumah tangga, wanita karier, atau ingin menjalankan peran ganda (*multitasking*). Bagi umumnya perempuan di pedesaan atau dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi mereka sudah pasrah dengan nasib, pilihan satu-satunya adalah menjadi ibu rumah tangga. Tapi bagi perempuan yang tergolong berpendidikan mereka masih mempunyai beberapa pilihan.

*Pilihan pertama*, memilih pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga umumnya adalah mengurus keluarga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menyiapkan keperluan sekolah anak, melayani suami dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga adalah profesi seumur hidup, tanpa mengharapkan imbalan berupa gaji. Kepuasan dan kebahagiaan tersendiri ketika anak-anak atau anggota keluarganya mencapai sukses. Kebahagiaan dalam hidupnya adalah imbalan yang tak dapat dinilai dengan materi.

Banyak orang yang "*underestimated*" terhadap pekerjaan ibu rumah tangga, karena menganggap diri rendah, tidak mempunyai pekerjaan, dan sederet stigma yang kurang mendukung tentang peran seorang ibu rumah tangga. Hal ini sering kita lihat ketika seseorang diminta mengisi formulir pada kolom pekerjaan, ia melewatinya begitu saja tanpa diisi. Atau kalau pun mengisi, ia lebih memilih untuk menulis pekerjaan yang lain misalnya wiraswasta, dan lain-lain.

*Pilihan kedua*, memilih pekerjaan sebagai wanita karier. Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>12</sup> Istilah ini biasanya sering diidentikkan dengan wanita pintar atau wanita modern. Wanita karier adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja pada orang lain atau mempunyai usaha sendiri. Saat sekarang ini menjadi wanita karier adalah impian banyak wanita. Tuntutan pekerjaan seorang wanita karier untuk

---

<sup>12</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 508.

bertemu dengan banyak orang membuatnya semakin percaya diri. Sehingga sering terjadi keinginannya untuk membina sebuah keluarga menjadi terabaikan.

Dalam hal kemandirian, wanita karir memiliki kemandirian yang lebih baik dibandingkan yang bukan wanita karier. Tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga mandiri dalam kesehariannya. Wanita karier cenderung memiliki komitmen yang kuat yang membuat mereka sanggup bekerja sepenuh hati tanpa harus merepotkan orang lain. Dia sudah biasa melakukan semua pekerjaan dengan mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain.

*Pilihan ketiga*, mengambil jalan tengah dengan melakukan peran ganda (multitasking). Multitasking adalah menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus, baik dalam waktu yang sama ataupun berpindah antara satu tugas ke tugas lainnya secara bergantian dalam waktu yang singkat. Maksudnya di samping memilih pekerjaan sebagai wanita karier, baik di instansi pemerintah maupun di sektor swasta, dalam kurun waktu yang sama ia juga tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Pilihan jalan tengah sekarang ini banyak dilakukan oleh kaum perempuan, karena dianggap lebih manusiawi dan tidak menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan.

Berpendidikan tinggi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kalangan orang tua yang berjuang keras agar anak-anaknya bisa sukses, apalagi bagi masyarakat pedesaan seperti di wilayah Hulu Sungai Propinsi Kalimantan Selatan, yang pada umumnya bekerja sebagai petani. Sebagai seorang perempuan lulusan perguruan tinggi, biasanya akan lebih memilih untuk bekerja daripada “di dapur”. Konsep berpikirnya sangat sederhana, mereka sudah menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk kuliah. Sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka ingin menerapkan apa yang telah dipelajari selama kuliah. Di sisi lain, mereka juga ingin memiliki keluarga yang harmonis dan memiliki anak sebagaimana layaknya seorang perempuan.

Menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia, sehingga sebaik apapun jabatan wanita di pekerjaannya, hendaknya melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Padatnya rutinitas pekerjaan dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga di rumah, menyebabkan seorang wanita karier harus pandai

membagi waktu. Semua pekerjaan dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. Hal ini harus dilakukan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan selaras. Untuk itu harus dibuat jadwal harian antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga. Contoh, pagi hari sebelum berangkat bekerja adalah waktu untuk mengurus rumah tangga. Setelah itu, ia akan berangkat bekerja. Sore hari sepulang bekerja sampai malam hari adalah waktu yang disediakan untuk keluarga (*quality time*). Bekerja memang penting, tetapi urusan keluarga juga tidak kalah pentingnya.

## **Penutup**

Sistem patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dominasi budaya patriarki yang sudah mengakar secara kuat di masyarakat menyebabkan posisi kaum perempuan menjadi termarginalkan. Budaya patriarki menekankan pada superioritas kaum laki-laki, dan kaum perempuan hanya ditempatkan dalam wilayah domestik, yaitu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan.

Gender adalah sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh sistem dimana keduanya berada. Konstruksi sosial ini dianggap sebagai proses sosial dan interaksi sosial, yang pada akhirnya menciptakan realitas sosial. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan gender. Kalau terjadi ketidakadilan gender maka akan muncul diskriminatif gender, dan yang paling banyak dikorbankan adalah kaum perempuan. Untuk itulah diperlukan perubahan sistem sosial agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender, antara lain melalui pemberdayaan perempuan.

Pilihan bagi perempuan masa kini adalah menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karier, atau menjalankan peran ganda (*multitasking*). Ketiga jenis pekerjaan tersebut memiliki sisi positif (kelebihan) dan kekurangannya masing-masing. Pada akhirnya pilihan diserahkan kepada masing-masing individu perempuan yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Margret, dkk. 2018. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia-UI.
- DPR RI. *Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33754/t/Tiga+Politisi+Wanita+Bicara+Peran+Perempuan+dalam+Politik> (10 Januari 2023).
- KBBI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lusia Palulungan, dkk. 2017. *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Lusia Palulungan, dkk. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Nany Suryawati. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing. Rasyidin, dan Fidhia Aruni. 2016. *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Banda Aceh: Unimal Press.
- Prasanti, Ditha. 2012. "Tubuh Perempuan Tambang Emas Bagi Media Massa." *Journal Citra Perempuan Dalam Media*, vol. 10, no. 1.
- Rasyidin. 2016. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Banda Aceh: Unimal Press.
- Saidah Sakwan, dkk. 2007. *Politik Perempuan dalam Ormas Keagamaan*. Jakarta: IRCOS.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.